



MERDEKA BELAJAR: UJIAN NASIONAL, KEGELISAHAN POLITIK, DAN SUBSTANSI

oleh: Najelaa Shihab

Reformasi pendidikan di Indonesia dilakukan lewat perubahan legislasi guru dan kurikulum, namun reformasi *assessment* dan Ujian Nasional (UN) belum tersentuh secara fundamental. Padahal keberhasilan reformasi pendidikan negara amat dipengaruhi oleh perubahan sistem penilaian. Sayangnya, kesibukan tentang *assessment* adalah keberisikan semata. Sulit untuk tidak melihat kebijakan terkait UN sebagai keputusan yang didominasi kepentingan politik, *quick win* atau kampanye sesaat; dan merupakan kepentingan yang sejatinya tidak substantif dan tidak berkaitan dengan tujuan *assessment* dalam sistem pendidikan, apalagi manfaat untuk siswa sebagai subjek pendidikan. Ini karena “kekuatan” UN luar yang biasa. Walaupun anggarannya hanya 0,1% dari total anggaran fungsi pendidikan, kebijakan ini menyangkut puluhan juta orang.

Untuk menjawab efektivitas UN, kita perlu mengembalikan fungsinya pada tujuan esensial pendidikan. Apakah UN berdampak pada perluasan akses, mempercepat pencapaian mutu, dan mengurangi kesenjangan? Usulan kerangka strategis penilaian sudah dibahas banyak pemangku kepentingan, namun keterbatasan kapasitas membuat agenda ini tidak menjadi prioritas alokasi sumberdaya. Moratorium sejatinya bisa memberi kesempatan refleksi utuh tanpa beban penyelenggaraan UN di tahun berjalan.

Proses perbaikan dan implementasi Kurikulum 2013 (K13) selama ini tidak diawali dengan perubahan penilaian pendidikan padahal peningkatan mutu membutuhkan proses *assessment* utuh terhadap semua standar dan pemangku kepentingan. UN saat ini seolah-olah menjadi indikator tunggal untuk menandakan siswa sukses, guru kompeten, serta sekolah bermutu dan favorit. Kondisi ini menghambat tumbuhnya ekosistem pendidikan.

Efektivitas sistem penilaian pendidikan Indonesia masih harus terus ditingkatkan. UN memiliki keterbatasan. Angka rata-rata hasil UN yang digunakan untuk menggambarkan pendidikan berbeda sekali dengan angka PDB (Produk Domestik Bruto) yang lebih komprehensif menggambarkan perekonomian suatu negara. Akreditasi sekolah

Pemimpin Redaksi: Nisa Faridz **Redaktur:** 1. Henny Supolo Sitepu 2. Ifa H. Misbach 3. Najelaa Shihab

Editor: Siti Nur Andini & Hasan Asyari **Kontributor Tamu:** Kreshna Aditya, Itje Chodijah, Patrya Pratama, Isabella Tirtowaluyo

kita masih lebih banyak melabel dan belum membantu sekolah mandiri mengembangkan kapasitas. Penilaian kinerja guru masih terbatas mengetes pengetahuan atau teknik mengajar, belum mendorong kompetensi sosial kepribadian dan sosial guru untuk merdeka belajar. Dengan demikian, tugas pemerintah berkaitan dengan penilaian (*assessment* dan evaluasi) masih banyak dan kompleks.

Disadari atau tidak, tugas ini hendak “diselesaikan” dengan UN. UN dengan kelemahan-kelemahannya, UN yang bahkan untuk menjadi definisi kesuksesan siswa pun masih belum cukup komprehensif. Kompetensi yang bisa terukur lewat satu kali tes pilihan berganda sangat terbatas. Alat *assessment* seyogianya bertujuan jelas tanpa dicampuradukkan, mendiagnosis atau memetakan, menyeleksi atau mensertifikasi kompetensi. Dan saat ini UN dibebani semua tujuan tersebut, di mana walaupun tidak menentukan kelulusan, posisi dan fungsinya tidak berkurang signifikan.

UN diharapkan mengukur segala hal dalam pendidikan. Sementara jika menggunakan analogi pengukuran tubuh, kita tahu bahwa untuk mengukur hal sederhana, seperti tinggi dan berat badan, kita memerlukan meteran dan timbangan, nilainya dalam cm dan kg – dua alat dan dua satuan yang berbeda. Maka tidak sepatutnya mengukur pendidikan, suatu proses yang kompleks, dengan menggunakan satu angka hasil UN di akhir jenjang. Indonesia membutuhkan sistem *assessment* siswa yang berbeda untuk masing-masing fungsi.

Saat ini *Indonesian National Assessment Program* sebagai alat pemetaan sedang diuji coba oleh Kemdikbud. Fungsi pemetaan tidak membutuhkan pengukuran setiap tahun pada semua siswa. Selanjutnya, alat seleksi dan sertifikasi juga perlu dikembangkan. Dalam seleksi, banyak evaluasi yang bisa dipelajari dari seleksi masuk perguruan tinggi yang tidak lagi menggunakan UN sebagai indikator.

Reformasi *assessment* dan moratorium UN tidak terpisah dari konsep otonomi, yang menyangkut pembagian tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah maupun kewenangan guru dan satuan pendidikan. Pengalaman penghentian UN jenjang SD yang digantikan oleh Ujian Sekolah (diselenggarakan dalam bentuk ujian daerah), perlu dimonitor dan dievaluasi. Implementasinya sering kali lebih buruk

daripada UN karena kapasitas pemerintah daerah (LPMP, KKG) dan MGMP belum optimal. Peran pusat terbatas pada menyumbangkan 25% soal, belum mendorong meningkatnya standar alat ukur dan standar nasional pendidikan. Belum terlihat konsolidasi hasil dan pembinaan sistematis yang menindaklanjuti.

Saat berbicara tentang *assessment*, fungsi terpenting adalah manfaatnya bagi siswa. Namun, diskursus UN sering kali terbatas pada teknis pelaksanaan ujian, bukan apa yang terjadi sesudahnya – yaitu bagaimana nilai UN digunakan untuk proses belajar siswa. Saat terjadi perbedaan pendapat antara anggota legislatif, pakar, guru, maupun orangtua, siswa cenderung sepakat menolak UN. Ini bukan berarti siswa kurang termotivasi dan kurang memiliki kemauan untuk bekerja keras. Sebaliknya, sikap negatif siswa harus dianggap sebagai umpan balik terpenting tentang gagalnya UN.

Siswa didorong oleh motivasi internal untuk terus memahami disiplin ilmu dan membutuhkan penilaian informatif dan bermakna. Rendahnya jumlah siswa yang memilih melakukan ujian perbaikan, tingginya kecurangan sistematis UN, jelas menunjukkan bahwa kewajiban UN telah menumbuhkan pemahaman yang keliru tentang makna pendidikan dan belajar. Apa pun alternatif *assessment* yang akan dikembangkan pemerintah, perlu mempertimbangkan pemenuhan hak siswa serta kewajiban negara secara seimbang. Opsi harusnya ada pada siswa. Siswa memilih jenis sertifikasi yang dibutuhkan atau alat seleksi yang bermanfaat untuknya. Ini akan menjadi situasi ideal untuk mendorong pemerintah terus meningkatkan kualitas alat ukur serta berfokus pada dampak nyata yang dirasakan siswa.

Akhirnya, ujian sesungguhnya dalam pendidikan kita bukan ujian nasional. Tetapi, apakah pemerintah mampu “lulus” ujian publik. Pemerintah yang mewujudkan agenda program prioritas Nawacita untuk mengevaluasi model penyeragaman lewat UN dan mengikuti putusan MA tahun 2009 yang mensyaratkan pemenuhan beberapa kondisi standar pelayanan sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ujian terstandar nasional. Pemerintah dengan tujuan dan aspirasi yang jelas, cetak biru yang strategis, serta data dan umpan balik yang konsisten.

Tajuk Edisi Ini:

Merdeka Belajar: Ujian Nasional, Kegelisahan Politik, dan Substansi

PISA 2015, Bagaimana Kinerja Indonesia?

Si Pemberi Rasa Kehidupan: Karakter

Catatan Akhir Tahun Capaian Nawacita Bidang Pendidikan

Pendidikan Literasi Media Penangkal *Hoax*

Beranda PSPK

PISA 2015, BAGAIMANA KINERJA INDONESIA?

oleh: Kreshna Aditya

Sesudah tiga tahun berselang, pemetaan pendidikan global *Programme for International Student Assessment (PISA) 2015* kembali diluncurkan di akhir tahun 2016 oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Hasil PISA selalu dinanti oleh pegiat dan pemerhati pendidikan, terutama soal ranking Indonesia dibanding negara-negara lain.

Pada PISA 2015 ini, kinerja siswa Indonesia berusia 15 tahun dalam bidang sains mengalami kenaikan 21 poin dan menempatkan Indonesia pada peringkat 62 dari 69 peserta (3 peserta lain tidak masuk dalam ranking negara karena pemetaan dilakukan di tingkat kota). Peningkatan ini adalah peningkatan tercepat kelima dibanding negara-negara lain, walau peningkatan tertinggi memang diraih oleh negara-negara peringkat bawah yang memiliki ruang lebih lapang untuk peningkatan. Kinerja Matematika siswa Indonesia juga mengalami peningkatan, sedangkan Literasi Bacaan cenderung stagnan.

Informasi dan hikmah penting dari PISA justru terletak pada pemetaan yang lebih mendalam di balik angka-angka kinerja akhirnya. Layaknya hasil pemeriksaan kesehatan, informasi penting bukan terletak di angka masing-masing parameter tes laboratorium, namun pada tren kesehatan, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tes, serta rekomendasi obat dan perawatan yang diperlukan. Pada PISA 2015 ini, misalnya, terlihat beberapa poin informasi yang dapat menjadi pertimbangan perbaikan ke depan, seperti:

- Peningkatan kinerja keseluruhan lebih didorong oleh peningkatan kinerja siswi di Indonesia daripada siswa.
- Perbedaan kinerja antara 10% siswa dengan kinerja tertinggi dan 10% siswa dengan kinerja terendah tidaklah terlalu jauh, bahkan tergolong terkecil dibanding negara-negara lain. Poin ini menunjukkan siswa Indonesia masih rata berkinerja rendah dibanding negara-negara lain.
- Pemerataan mutu pendidikan masih menjadi masalah, dengan ditampakkan pada persentase siswa Indonesia dengan latar belakang sosio-ekonomi marjinal serta berkinerja sains rendah tergolong sebagai yang tertinggi di dunia. Dalam urusan ketimpangan ini, Indonesia menempati peringkat terburuk ke-9.
- Kekhawatiran terbesar bagi kepala sekolah di Indonesia adalah kurang tersedianya materi pembelajaran yang bermutu di sekolah yang mereka pimpin. Bahkan 1 dari 3 siswa di Indonesia belajar di sekolah yang kepala sekolahnya menyatakan bahwa proses pembelajaran tidak optimal karena ketidaktersediaan materi pembelajaran yang bermutu.
- Walaupun demikian, lebih banyak kepala sekolah di Indonesia yang menyatakan bahwa lingkungan pembelajaran yang mereka pimpin memiliki situasi dan nuansa positif, dibanding dengan kepala sekolah di negara lain.

Berbagai informasi dan hikmah lainnya, serta rekomendasi dari laporan PISA dapat dilihat pada tautan: <http://www.oecd.org/pisa>, dan pada Ringkasan Eksekutif khusus membahas kasus Indonesia yang dapat dilihat pada tautan: <http://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Indonesia.pdf>.

Secara umum, Indonesia diharapkan mulai bergerak kepada peningkatan mutu dan tak hanya akses dasar. Belanja anggaran pendidikan nasional dan daerah yang lebih efektif, lebih terarah dan terukur adalah rekomendasi umum yang dapat dilihat pada berbagai pemetaan pendidikan Indonesia, termasuk PISA 2015.

Patut jadi perhatian kita pula bahwa berbagai hasil pemetaan pendidikan, baik tingkat global seperti PISA maupun tingkat nasional seperti Ujian Nasional, berikut rekomendasinya, seringkali tak sampai hingga ke tingkat sekolah dan keluarga. Bahkan tak pula tersampaikan secara efektif kepada dinas-dinas pendidikan di kabupaten, kota, maupun propinsi, juga kepada organisasi guru dan LPTK, untuk dijadikan pertimbangan dalam perencanaan perbaikan akses dan mutu pendidikan ke depan. Memastikan rekomendasi dari berbagai pemetaan pendidikan sampai kepada para pengambil keputusan di tingkat

terendah menjadi sangat penting untuk memastikan perbaikan dilakukan secara bersama oleh semua, tak hanya berhenti pada wacana di puncak.

Satu hal lagi yang perlu diwaspadai oleh para pemimpin dan pengambil keputusan di tingkat nasional adalah tidak menjadikan PISA, maupun setiap alat pemetaan pendidikan lainnya, sebagai *high-stake test* atau rezim yang menjadi arah penentu kebijakan dan fokus tunggal demi melindungi harga diri bangsa secara semu. PISA adalah salah satu alat ukur dalam “dasbor” pendidikan yang dapat memperkaya pemahaman tentang kondisi pendidikan di Indonesia, namun perencanaan kebijakan pendidikan tak selayaknya menjadi sempit dan reaktif terhadap satu alat pemetaan yang juga memiliki berbagai keterbatasan. Sangatlah penting untuk memposisikan dan mengatur porsi setiap alat ukur dalam ekosistem asesmen pendidikan. Mendewakan sebagiannya saja tak akan membawa kita maju, justru akan membawa stagnansi dan kemunduran.

SI PEMBERI RASA KEHIDUPAN: KARAKTER

oleh: Itje Chodidjah

Pendidikan karakter dalam arti luas adalah proses pembentukan kualitas pribadi setiap individu agar kemudian dapat lebih mudah menjalani kehidupannya. Seseorang dengan karakter yang kuat akan mampu mengendalikan dirinya lebih baik. Ia tidak sulit untuk menghargai orang lain dan berempati atas penderitaan orang lain. Alhasil pendidikan karakter itu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan setiap individu.

Pendidikan karakter seseorang diawali dari keluarga. Orang tua atau siapapun yang bertanggung jawab memelihara anak dalam keluarga memiliki peran penting pada awal kehidupan individu anak. Kemampuan mereka membangun lingkungan rumah yang sehat secara fisik dan mental sangat berpengaruh dalam perilaku anak. Anak yang dibesarkan oleh keluarga yang selalu menanamkan kedisiplinan, keterbukaan, rasa saling hormat, misalnya, akan teguh mempertahankan perilaku tersebut. Sebaliknya anak-anak dari keluarga yang jarang memberikan penghargaan pada anak, misalnya, maka anak juga akan tumbuh dengan

perilaku cuek dan sulit menghargai orang lain.

Selain keluarga nilai-nilai masyarakat di mana anak dibesarkan juga memberi warna terhadap perkembangan karakter mereka. Anak-anak perlu dikenalkan secara sengaja tentang berbagai kegiatan tinggalkan leluhur, terutama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Setiap daerah di Indonesia, misalnya memiliki berbagai pepatah yang menguatkan karakter, ada *becik ketitik olo ketoro*, yang maknanya kebaikan dan keburukan itu tampak. Dari falsafah Minang kita dapati *kabuki samo mandaki kalurah sama manurun* yang mengisyaratkan gotong royong.

Bagaimana dengan sekolah? Ya, sebagai lembaga pendidikan formal, sudah barang tentu sekolah adalah wadah yang subur untuk pengembangan karakter siswanya. Berbagai kegiatan di sekolah dari siswa memasuki pintu gerbang sampai mereka meninggalkannya dapat menjadi sarana penguatan karakter. Kepala sekolah, guru, dan staf lainnya di sekolah menjadi bagian integral penguatan karakter siswa. Melalui berbagai perilaku positif yang ditunjukkan oleh mereka, siswa pun secara tidak langsung telah dikembangkan karakternya. Menyadari hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Sebagaimana dicanangkan dalam butir Nawacita Presiden Jokowi, penguatan karakter bangsa adalah salah satunya dan merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Untuk mewujudkannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai Tahun Ajaran 2016. Terdapat 5 karakter inti yang saat ini dikembangkan, yaitu, Religius, Nasionalisme, Integritas, Kemandirian, dan Gotong Royong. Kelima karakter inti tersebut kemudian dirinci dalam sederetan karakter yang menginduk pada kelimanya.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang saat ini digalakkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud memang ditujukan kepada sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Namun dalam pelaksanaannya melibatkan orang tua dan masyarakat. Keluarga, masyarakat, dan sekolah sebagai tripusat pendidikan memiliki peranan penting dalam program PPK. Melalui budaya yang dikembangkan di sekolah PPK dapat dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan perilaku positif.

Kepala sekolah dan guru sebagai motornya secara otomatis menjadi teladan. Dalam proses pembelajaran di kelas, PPK dapat langsung

diintegrasikan melalui tema maupun mata pelajaran. Pengelolaan kelas oleh guru dan metode belajar yang dipilih juga merupakan ajang penguatan karakter siswa. Dalam metode kolaboratif misalnya berbagai karakter dapat dikembangkan.

Berbagai kegiatan ekstrakurikuler juga tak kalah pentingnya sebagai sarana PPK. Sekolah dapat bekerjasama dengan berbagai komponen masyarakat seperti sanggar budaya, museum, sentra usaha, atau kelompok-kelompok masyarakat yang secara kontekstual dapat membantu PPK. Komite sekolah dapat menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat. Dengan demikian kearifan loka dapat dikembangkan. PPK akhirnya harus menjadi landasan bagi tripusat pendidikan dalam mengembangkan generasi muda Indonesia.

Sesuai dengan sifatnya, karakter itu melekat pada diri individu dan akan tampak jelas dalam perilaku dan tindak tutur atau bahasa individu yang bersangkutan. Karakter itu adalah pemberi rasa dalam kehidupan seseorang. Bagaimana seseorang diterima dalam kelompok masyarakat ditentukan oleh karakter yang dimilikinya. Oleh sebab itu, mari kita terus kita galakkan penguatan pendidikan karakter kepada generasi penerus bangsa ini. Martabat bangsa ada pada kumpulan karakter individu-individu bangsa.

CATATAN AKHIR TAHUN CAPAIAN NAWACITA BIDANG PENDIDIKAN

oleh: Patrya Pratama

Bagaimana kabar capaian Nawacita menjelang akhir pergantian tahun 2016 dalam bidang pendidikan? Apakah *on-track* atau bahkan mungkin pertanyaan paling mendasar adalah apakah masyarakat masih ingat akan butir-butir yang tercantum dalam Nawacita yang menjadi visi, misi, dan janji kerja pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla? Memastikan pemerintahan selalu akuntabel terhadap janji-janji politiknya saat Pemilu lalu adalah sangat penting dan mengakhiri tahun 2016, mari kita melakukan refleksi bagaimana agar komitmen-komitmen dalam Nawacita tersebut tersampaikan dan tercapai (*delivered*).

Sekadar mengingatkan, dalam kampanye Pemilu

2014 lalu, Jokowi dan Jusuf Kalla meluncurkan dokumen Nawacita: Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian sebagai penjabaran atas visi, misi, dan program aksi yang akan dilakukan jika terpilih. Dalam dokumen setebal 42 halaman tersebut, komitmen politik Jokowi-JK dijabarkan dalam 31 agenda strategis, yang kemudian dirangkum menjadi sembilan (sehingga disebut “Nawacita”) agenda prioritas dalam pemerintahannya. Mengenai komitmen dalam dunia pendidikan, tiga dari sembilan Nawacita mengandung beberapa komitmen spesifik, yaitu Nawacita 5, 6, dan 8.

Dalam Nawacita 5, “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,” Jokowi berkomitmen pada program “Indonesia Pintar” dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Selain itu, Nawacita juga menjanjikan untuk memberikan dukungan pendanaan lebih banyak, dengan cara pemberian beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang D3, S1

sampai S3, baik dalam maupun luar negeri.

Dalam Nawacita 6, “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,” Jokowi berkomitmen pada pembangunan sejumlah politeknik dan SMK-SMK dengan sarana-prasarana berteknologi terkini.

Terakhir, dalam Nawacita 8, “melakukan revolusi karakter bangsa,” Jokowi berkomitmen pada penataan kembali kurikulum pendidikan nasional yang menekankan 70% substansi pendidikan dasar mengenai budi pekerti dan pembangunan karakter serta menjaga keseimbangan aspek muatan lokal/daerah dengan nasional demi kebhinekaan.

Secara khusus, Nawacita menghendaki pemberian jaminan hidup yang memadai bagi para guru yang ditugaskan di daerah terpencil melalui tunjangan fungsional, asuransi keselamatan kerja, fasilitas memadai dalam pengembangan keilmuan, serta promosi kepangkatan dan karier. Nawacita juga menyebutkan komitmen pada rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar dengan merata.

Masih dalam Nawacita 8, dicantumkan komitmen pada upaya mengevaluasi Ujian Akhir Nasional serta pemberian subsidi lebih besar kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk memperbesar akses warga miskin, serta pembangunan sarana transportasi menuju fasilitas pendidikan dengan kualitas memadai.

Tulisan ini tidak secara khusus membahas satu per satu capaian komitmen-komitmen politik Jokowi-JK dalam bidang pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Nawacita di atas. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang menurut penulis cukup penting untuk diperhatikan dalam memastikan *delivery* komitmen-komitmen politik tersebut agar tidak menguap begitu saja di sisa waktu pemerintahan hingga 2019.

Pertama, penerjemahan rencana-rencana aksi yang tercantum dalam Nawacita tidak akan ada artinya bila tidak diterjemahkan dengan indikator yang presisi dan tepat dalam dokumen-dokumen perencanaan resmi kelembagaan kementerian terkait, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN). Sebagai contoh, komitmen Nawacita yang menghendaki Wajib Belajar 12 tahun ternyata tidak terefleksi dalam dokumen perencanaan RPJMN atau RKM yang memandatkan wajib belajar 9 tahun. Hal

ini tentu menjadi kendala mengingat target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan berbeda dengan komitmen politik Nawacita. Sementara itu, kejelasan sebuah variabel capaian menjadi kunci penerjemahan sebuah komitmen politik, yang terlihat dari ketidakmampuan dokumen perencanaan dalam memahami definisi dari kuantifikasi “70% konten kurikulum pendidikan dasar mengenai pembangunan karakter” yang diinginkan dalam Nawacita (bagaimana Anda menguantifikasi konten kurikulum?).

Kedua, kita harus memahami bahwa implementasi sebuah komitmen politik selalu harus “lulus” dua jenis “ujian”: koordinasi lintas-institusi secara horizontal (misal, antarkementerian terkait) dan secara vertikal (misal, koordinasi dan kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat). Ketidakmampuan sebuah program melewati salah satu dari kedua ujian tersebut hampir pasti menjamin kegagalan *delivery*.

Sebagai contoh, kegagalan ujian koordinasi horizontal terlihat dari keterlambatan ketersediaan data penerima Program Indonesia Pintar dari Kementerian Sosial yang menjadi salah satu penyebab terlambatnya penyaluran kartu Indonesia Pintar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, kegagalan mendapatkan kerja sama dan komitmen dari Pemerintah Daerah menjadi alasan klasik yang membuat upaya redistribusi guru secara merata masih belum juga menemukan titik temu mengingat penempatan guru kerap kali masih menjadi alat politik bagi kepala daerah untuk mendapatkan dukungan saat pilkada.

Terakhir, untuk menilai keberhasilan *delivery* sebuah komitmen politik Nawacita memerlukan sebuah sistem pemantauan rutin yang tidak hanya memastikan proses dan keluaran sebuah program telah terlaksana, namun juga memastikan apakah program tersebut mencapai hasil yang diharapkan. Sebagai contoh, apakah benar pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana sekolah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah sebuah daerah? Hal ini hanya dapat dilakukan dengan adanya sebuah fungsi *monitoring* dan evaluasi yang jelas, tidak hanya menjadi sumber pemasukan tambahan pegawai pemerintah melalui biaya perjalanan dinas, namun sungguh-sungguh mampu memberikan *feedback* apakah intervensi/program yang dilakukan mencapai tujuannya.

PENDIDIKAN LITERASI MEDIA PENANGKAL HOAX

oleh: Isabella Tirtowaluyo

Di dalam sebuah ruang kelas, seorang guru sejarah memperkenalkan metode membaca sebuah dokumen bersejarah sebagai data primer serta cara menginterpretasi arti dan narasi sejarah yang didasarkan pada data tersebut. Murid-murid dilatih untuk mengevaluasi validitas interpretasi mereka serta kualitas dan bias sumber-sumber informasi yang mereka gunakan. Simulasi latihan berpikir kritis dalam mengonsumsi, menganalisis, dan menginterpretasi dokumen bersejarah itu kemudian dikaitkan dengan aktivitas berikutnya dengan menggunakan dokumen berita yang diambil dari media sosial, baik Facebook, Twitter, maupun pesan yang diteruskan dalam sebuah milis, forum, atau *platform* aplikasi seperti WhatsApp. Guru itu kemudian memberikan tantangan kepada para murid untuk membawa berbagai berita dan informasi kontroversial yang mereka pernah temukan di media sosial, lalu menilai validitas dan kebenaran berita-berita tersebut dengan keketatan prosedur yang dipakai dalam mengevaluasi sebuah dokumen sejarah. Mereka diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan, seperti: Apakah tujuan atau agenda tersirat dari tulisan dalam dokumen ini? Mengapa frasa atau kata-kata tertentu digunakan dalam tulisan ini? Siapa dan apa latar belakang orang-orang yang menulis berita itu? Guru itu kemudian juga menekankan pentingnya mengidentifikasi berbagai pernyataan yang disuguhkan dalam berita tersebut dan perlunya mengecek pembuktian (*evidence*) apa yang mampu mendukung pernyataan yang tertulis.

Di ruang kelas yang lain, seorang dosen mengadakan sebuah lokakarya tentang proses penulisan sebuah berita palsu atau *fake news/hoax*. Dalam lokakarya ini, partisipan mempelajari trik-trik bagaimana melakukan *misreporting* atau reportase palsu, dengan menciptakan narasi palsu berdasarkan sebuah peristiwa yang riil—antara lain dengan cara mendistorsi fakta atau memaparkan sebuah interpretasi yang berbias—dan juga bagaimana semua itu dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil laporan jurnalistik palsu mereka masih bisa lolos sebagai berita yang bisa dipercaya khalayak umum. Partisipan juga diajarkan teknik memanipulasi

untuk membuat gambar-gambar digital palsu. Tujuan utama dari mata kuliah ini tidak lain adalah sebenarnya bersifat satiris atau menyindir, untuk membangun kemampuan para partisipan berpikir kritis mengenai fenomena berita palsu atau *hoax*, dan juga keterampilan langsung untuk dengan cerdas dan teliti mengidentifikasi komponen sebuah berita palsu, sebagai awal proses *debunking* atau pembuktian kepalsuan sebuah informasi. Pendekatan pedagogis ini didasarkan pada pemikiran bahwa strategi yang terbaik untuk melawan penyebaran berbagai penipuan dalam bentuk *hoax* adalah dengan cara menyoroti lampu terang pada mekanisme tersembunyi (*hidden mechanism*) di balik proses penyusunan sebuah informasi yang salah, palsu, atau berbias.

Dua skenario pendidikan literasi media yang penulis berikan di atas didasarkan oleh dua inisiatif yang riil di Amerika Serikat. Skenario pertama didasarkan pada strategi pelatihan guru yang diadakan oleh *The Stanford History Education Group* (Balingit, 2016), sementara skenario kedua didasarkan oleh inisiatif satiris dari Proyek *UnderAcademy College*.

Ketika sebuah masyarakat melalui sebuah trauma atau fenomena sosial yang berdampak negatif, kerap kali pendidikan dan guru-guru diposisikan sebagai kambing hitam dan dianggap gagal dalam merealisasi berbagai tujuan pendidikan. Pendidikan dan terutama guru-guru pulalah yang kerap kali diberikan amanah dan tanggung jawab besar untuk melakukan perubahan. Dalam pemikiran ini, berbagai masalah sosial membuahakan tuntutan perubahan dalam ranah pendidikan. Inilah juga yang menjadi konteks tuntutan global yang dihadapi pendidik dan guru-guru saat ini untuk melawan fenomena penyebaran berita palsu atau *hoax*. Di Indonesia, panggilan kepada para pendidik ini menjadi lebih mendesak mengingat keresahan sosial yang dialami berbagai pihak, terutama dalam beberapa bulan terakhir akan adanya berbagai narasi dan reportase seputar peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Indonesia, yani seputar demonstrasi massal yang terjadi di ibukota.

Keresahan sosial ini memperlihatkan potensi dari kontribusi berita-berita palsu atau informasi bias dalam menimbulkan perpecahan atau *division* antar berbagai segmen masyarakat Indonesia, baik dari garis-garis politis-ideologis, etnis, agama, maupun sosial-ekonomi. Ketegangan pun dialami berbagai pengguna Internet/netizen seputar peristiwa sosial dan politik tersebut, yang tereksresi dalam

perseteruan melalui status di Facebook, fenomena “menghapus pertemanan” atau *unfriend*, dan “berhenti mengikuti” atau *unfollow* teman Facebook yang mengemukakan orientasi pendapat dan kepercayaan yang tidak sepaham. Dengan maraknya penyebaran informasi berbias dan berita palsu atau *hoax*, pendidikan dan guru-guru diminta mencari solusi untuk menuju kembalinya terbangun masyarakat yang harmonis dan menjunjung bhineka tunggal ika, serta generasi muda yang mampu mewujudkan esensi pembelajaran abad ke-21: kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) dalam konteks literasi media (*media literacy*).

Akan tetapi, seberapa siapkah para pendidik Indonesia untuk menyikapi tantangan ini?

Pertanyaan yang bisa membimbing pembelajaran pendidik adalah apa tujuan akhir pendidikan literasi media. Secara singkat, penulis akan menawarkan sebuah kerangka berpikir atau *conceptual framework* sederhana untuk membuat konkret pemikiran mengenai apa tujuan pendidikan literasi media. Penulis mengajak para pembaca dan pendidik untuk terus mengembangkan kerangka ini sampai menjadi sesuatu yang mampu memberikan arahan untuk praktik pendidikan.

Secara konsep, ada dua dimensi dari pendidikan literasi media yang ditawarkan penulis: dimensi substansi-kompetensi dan dimensi disposisi-persepsi. Kerangka ini diadaptasi dari kerangka konsep pemahaman pendidikan global (Case, 1993). Dimensi substansi ini menjawab pertanyaan, apa yang harus diketahui siswa dan mampu dilakukan siswa untuk menghidupkan literasi media dalam interaksi keseharian mereka dengan informasi dan dengan sesamanya, sementara dimensi disposisi-persepsi menjawab pertanyaan, nilai-nilai apa atau sudut pandang apa yang mewujudkan seorang individu dengan literasi media.

Dimensi substansi dalam pendidikan literasi media mengacu pada pembangunan pemahaman akan fitur dan sifat dunia informasi dan media sosial, serta pengertian mengenai konsep-konsep yang relevan seputar bagaimana dan mengapa informasi disusun atau dibuat, disebar, dan dikonsumsi. Termasuk di sini adalah pengertian mengenai fenomena penyebaran *hoax* dan realita di lapangan, serta peran teknologi internet masa kini dalam melahirkan fenomena tersebut. Pertanyaan yang relevan contohnya adalah apa saja sumber-sumber *hoax* dan informasi yang bias dan apa saja sumber-sumber informasi, baik yang partisan maupun non-partisan, yang berkualitas dan bisa dipercaya di Indonesia.

Salah satu substansi literasi media adalah pemahaman sifat-sifat *platform* media sosial yang membuahkan

fenomena tertentu, misalnya bagaimana dalam Facebook popularitas sebuah informasi, yang diukur dengan jumlah orang yang memberikan simbol “suka” atau berapa kali informasi tersebut pernah dibagikan, sama sekali tidak berkorelasi dengan validitas informasi tersebut. Alhasil, terlahirlah fenomena pada masa kampanye pemilihan Presiden di Amerika Serikat, bahwa lebih banyak berita palsu yang disirkulasikan oleh pengguna Facebook seputar Donald Trump dibanding berita yang valid. Fenomena lain adalah adanya ketimpangan jenis informasi yang dikonsumsi segmen masyarakat yang berbeda melalui media sosial—misalnya informasi yang pro-Donald Trump yang bersirkulasi hanya di dalam komunitas-komunitas yang orientasinya adalah pro-Trump. Konsep-konsep seperti “*echo chamber*” atau “*filter bubble*” termasuk penting untuk membangun pengertian mengenai fenomena ini.

Substansi pendidikan literasi media juga harus mengacu pada pembangunan *skill* dan *how-to* atau keterampilan praktis untuk berpikir kritis dalam berinteraksi dengan informasi, baik dari segi menyusun, merumuskan kembali, menyebar, dan mengonsumsi. Misalnya, peserta didik harus tahu apa yang dimaksud dengan dan bagaimana cara melakukan pengecekan fakta atau *fact-checking*. Peserta didik juga, misalnya, harus membangun pengertian dan keterampilan mengenai *lateral reading* atau “percabangan” membaca, di mana ketika individu dihadapkan pada sebuah sumber informasi *online* yang belum atau tidak ternama, yang pertama dilakukan adalah membelah pemikiran mereka—ini yang dimaksud dengan “percabangan”—dengan meninggalkan laman informasi tersebut untuk terlebih dahulu melakukan investigasi singkat dan mencari informasi latar belakang organisasi, komunitas, atau penulis di balik informasi yang disuguhkan.

Yang terakhir, dimensi disposisi-persepsi pendidikan literasi media mengacu pada sikap-sikap dan nilai-nilai apa saja yang diperlukan dan menjadi basis perwujudan literasi media. Sikap dan nilai ini berhubungan dengan wujud *good citizenship* atau kewarganegaraan dalam konteks interaksi individu dengan informasi dan sesamanya dalam masyarakat. Sementara dalam konteks komunitas media sosial, nilai-nilai ini berhubungan dengan *good netizenship*. Nilai yang diajarkan pendidikan literasi media, contohnya adalah: 1) kesadaran akan peran pentingnya data, fakta, dan bukti (*evidence*) dalam menyusun sebuah informasi yang tepercaya dan argumen yang kuat, 2) perlunya skeptisisme dalam dosis yang sehat dalam menghadapi berbagai informasi; 3) kesadaran akan keragaman sudut pandang dan kompleksitas fenomena sosial dan

hidup bermasyarakat sehingga timbul bermacam informasi dan versi berita yang mewakili keberagaman tersebut; 4) kesadaran akan bias pribadi atau *personal bias* dalam menyebarkan dan mengonsumsi informasi-informasi tertentu, dan 5) keterbukaan untuk memperlebar sumber dan memvariasikan jenis informasi yang didapatkan.

Contoh skenario di atas sebagai ilustrasi praktik pendidikan literasi media dan kerangka konseptual yang disajikan di sini—dimensi substansi dan

dimensi disposisi-persepsi—hanya bertujuan untuk mengembangkan pemahaman kita mengenai pendidikan literasi media. Semoga pembaca dan pendidik bisa bersama-sama mengisi, melengkapi, dan memperkaya kerangka ini dalam upaya kita bersama membimbing generasi muda serta semua partisipan dunia informasi untuk menjadi warga negara dan netizen yang lebih bertanggung jawab dan mampu berpikir kritis serta berani menjaga keutuhan dan kekayaan kebhinekaan bangsa Indonesia.

BERANDA PSPK

Beranda PSPK merupakan diskusi publik pendidikan yang digagas oleh Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) yang rutin dilaksanakan secara berkala. Beranda PSPK membahas berbagai topik/ isu kontemporer dan kontekstual yang berkaitan dengan pendidikan dan menghadirkan narasumber multisektor dengan beragam perspektif. Beranda PSPK sebagai bentuk program dengan konsep diskusi terbuka, santai, namun tetap ilmiah untuk merumuskan berbagai ide dan gagasan, mempresentasikan hasil riset, serta mengedukasi masyarakat dengan cara lebih ringan dan mudah dipahami.

Beranda PSPK pertama kali ini bertajuk “Literasi Menangkal Hoax” sebagai upaya meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya keterampilan membaca (literasi) sebagai salah satu indikator utama untuk menghasilkan kualitas berpikir kritis serta upaya mengedukasi masyarakat dalam memilah informasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif persebaran berita palsu (*hoax*) yang marak terjadi di media sosial. Diskusi Publik Pendidikan

(Beranda) PSPK ini yang diadakan pada:

Hari/ tanggal: Kamis, 22 Desember 2016

Waktu: pukul 15.30-18.00 WIB

Tempat: Ruang Meeting Juragan, 5th floor Eat & Eat, FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta

Dengan narasumber/pembicara:

1. Prof. Ir. Nizam, M.Sc. DIC, Ph.D (Kepala Puspendik, Kemdikbud)
2. Roby Muhamad, Ph.D (Co-Founder Provetic)
3. Dr. Anindito Aditomo, Ph.D (Peneliti PSPK dan Dosen Universitas Surabaya)
4. Miko Ginting (Researcher Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)

Moderator: Ifa H. Misbach (Direktur PSPK dan Dosen Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia)

Agenda Beranda PSPK selanjutnya mengambil topik: Pilkada dan Pendidikan Pilih Pemula. PSPK perlu menyoroti isu tersebut berkaitan dengan Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada Februari 2017 sehingga perlu pendidikan politik, terutama bagi pemilih pemula.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) adalah lembaga riset non-profit yang fokus pada inovasi, isu pendidikan, dan kebijakan pendidikan yang memiliki dampak luas terhadap dinamika ekosistem pendidikan di daerah-daerah.

Mengacu pada dinamika terbukanya kesempatan keterlibatan publik dan advokasi kebijakan pada periode pemerintahan saat ini, maka lembaga riset PSPK didirikan untuk berkolaborasi menjadi mitra independen bagi pemerintah di bidang pendidikan.